

PENCEGAHAN KORUPSI DAN DAMPAK MASSIF KORUPSI PADA LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

Saipul Ma'arip¹, Edy Soesanto², Wangsit Satriandaru³, Aditya Dwi Laksono⁴
Email: 202310415262@mhs.ubharajaya.ac.id, edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id,
202310415176@mhs.ubharajaya.ac.id, 202310415047@mhs.ubharajaya.ac.id

Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Teknik
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ABSTRAK

Sejarah mencatat bahwa isu korupsi telah merasuki lingkungan sekolah dan menjadi permasalahan yang perlu ditangani. Upaya penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam dunia pendidikan tercermin dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Pasal 13 huruf d, yang menegaskan perlunya "mengimplementasikan program pendidikan antikorupsi di setiap tingkat Pendidikan". Hal ini dianggap sebagai pilar utama dalam mengantisipasi dan mencegah praktik korupsi. (Aris Munandar & Oki Dermawan, 2021). Beberapa sekolah terperangkap dalam lingkaran korupsi, dan jika diperhatikan, pelaku yang sering terlibat dalam tindakan korupsi umumnya berasal dari kepala sekolah, staf tata usaha, dan guru-guru. Pemimpin yang memiliki wewenang tinggi rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, yang kemudian menjadi pintu masuk untuk tindakan koruptif di lingkungan sekolah. Untuk mencegah penyebaran perilaku koruptif yang masif, diperlukan penguatan kelembagaan dan komitmen pimpinan sekolah untuk tidak mentoleransi tindakan korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi perilaku korupsi, seperti merancang perencanaan yang baik dan menerapkan sistem lelang barang dan jasa secara online. Selain itu, pimpinan sekolah juga perlu menyosialisasikan semangat anti-korupsi secara menyeluruh kepada seluruh anggota masyarakat di sekolah. Maraknya tindakan korupsi belakangan ini mencerminkan akumulasi perilaku masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Perlu diakui bahwa lembaga pendidikan, khususnya dunia pendidikan formal, turut berkontribusi terhadap perkembangan perilaku koruptif, manipulatif, dan nepotisme dalam konteks tertentu, terutama dalam proses transfer pengetahuan dan nilai-nilai pendidikan di ruang kelas dan lingkungan sekolah. Proses penyadaran terhadap korupsi harus ditanamkan dan diperjuangkan agar Indonesia dapat segera terbebas dari jerat tindak pidana korupsi. Pendidikan anti-korupsi di tingkat sekolah menengah atas (SMA) merupakan salah satu solusi alternatif untuk

membongkar "budaya" korupsi yang masih berlaku di berbagai lapisan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : Korupsi, Pencegahan korupsi, Lingkungan sekolah, Dampak korupsi, Staf Sekolah

PENDAHULUAN

Korupsi adalah permasalahan serius yang dapat menghancurkan integritas, etika, dan keadilan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Lingkungan sekolah, yang seharusnya berperan penting dalam membentuk karakter, moral, dan integritas generasi muda, sayangnya, telah terkontaminasi oleh praktik korupsi. Dampak buruknya tidak hanya dirasakan oleh para siswa dan tenaga pendidik, tetapi juga merambah ke masyarakat dan negara secara keseluruhan. Untuk mengatasi permasalahan ini, penting untuk memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sejak dini. Peserta didik perlu diperkenalkan pada nilai-nilai konkret yang diyakini dapat menjadi benteng melawan tindakan korupsi. Upaya ini menjadi semakin mendesak karena peserta didik masih kurang mendapatkan informasi dan sosialisasi yang memadai mengenai bahaya korupsi. Dengan demikian, perlu dilakukan penyuluhan yang lebih intensif dan pendalaman terhadap nilai-nilai integritas untuk membangun kesadaran antikorupsi. Selain itu, perlu ditekankan bahwa penerapan pembelajaran efektif untuk melawan korupsi masih belum optimal. (Adelia Ravita Sekar Sari, 2021)

Korupsi dalam konteks lingkungan pendidikan mengacu pada berbagai perilaku yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, dana, atau sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tindakan korupsi di lingkungan sekolah dapat mencakup praktik-praktik seperti penyelewengan dana sekolah, pungutan liar, nepotisme dalam proses rekrutmen staf, penjualan jawaban ujian, dan berbagai bentuk korupsi lainnya yang merugikan proses pendidikan. Oleh karena itu, upaya untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada generasi muda dianggap sebagai langkah yang efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Meskipun menangani korupsi di lingkungan pendidikan memerlukan waktu dan upaya yang konsisten, memiliki harapan besar bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang bebas korupsi di masa depan tetap menjadi tujuan yang mungkin dicapai. (Rilo Pambudi. S et al., 2021)

Mencegah tindakan korupsi di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi hal yang sangat krusial dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan berintegritas. Tindakan korupsi di dalam lingkungan sekolah tidak hanya berdampak pada moral siswa, namun juga dapat menghambat proses pembelajaran dan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan.

Keberhasilan mewujudkan integritas dianggap sebagai indikator penting dalam upaya pencegahan tindakan korupsi, karena integritas mengandung nilai kejujuran dan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip moral. Oleh karena itu, praktik kejujuran dianggap sebagai pondasi utama bagi individu yang dianggap memiliki integritas, dan hal ini sering dijadikan tolak ukur dalam upaya mencegah dan menanggulangi korupsi di lingkungan pendidikan, khususnya di tingkat SMA. (Anita et al., n.d.)

METODELOGI

Bagaimana Pihak Sekolah Dapat Mencegah Praktik Korupsi di Dalam Lingkungan Sekolah?

- a. Pengembangan Kebijakan Anti-Korupsi
Sekolah dapat mengembangkan kebijakan yang jelas dan tegas terkait dengan anti-korupsi. Kebijakan ini harus mencakup panduan etika, norma perilaku, serta sanksi yang akan diberlakukan terhadap pelaku korupsi.
- b. Pendidikan dan Pelatihan
Sekolah harus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada semua anggota komunitas sekolah, termasuk staf, guru, siswa, dan orang tua, tentang bahaya korupsi dan cara melaporkannya.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas
Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana sekolah, termasuk anggaran dan penggunaan dana, dapat membantu mencegah korupsi. Sekolah harus secara teratur mengaudit keuangan mereka dan membuat laporan keuangan yang mudah diakses oleh publik.
- d. Pembentukan Komite Anti-Korupsi
Sekolah dapat membentuk komite anti-korupsi yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk guru, staf, siswa, dan orang tua. Komite ini dapat mengawasi aktivitas yang terkait dengan keuangan sekolah dan memberikan saran tentang cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- e. Prosedur Pelaporan: Sekolah harus menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia bagi mereka yang ingin melaporkan praktik korupsi. Penting untuk melindungi pelapor dari kemungkinan represalias.
- f. Sanksi Tegas: Sekolah harus memiliki sanksi yang tegas dan diberlakukan dengan konsisten terhadap pelaku korupsi. Ini harus termasuk tindakan hukum jika diperlukan.
- g. Pengawasan Eksternal: Melibatkan pihak eksternal seperti orang tua, LSM, atau pemerintah setempat dalam pengawasan dan evaluasi keuangan sekolah dapat membantu mencegah korupsi.

Apa yang Bisa Dilakukan Siswa untuk Melaporkan Tindakan Korupsi yang mereka Saksikan di Sekolah?

- a. Bicarakan Dengan orang terpercaya
Siswa dapat memulai dengan berbicara kepada orang-orang yang mereka percayai, seperti orang tua, guru, atau staf sekolah yang mereka yakini tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Ini dapat membantu mendapatkan nasihat dan dukungan dalam mengatasi masalah tersebut
- b. Kumpulkan Bukti
Ebis mungkin, siswa harus mencoba mengumpulkan bukti terkait tindakan korupsi yang mereka saksikan. Ini dapat berupa catatan, foto, atau dokumen yang menunjukkan tindakan tidak etis atau ilegal.
- c. Laporkan ke Pihak Berwenang Sekolah
Siswa dapat melapor kepada pihak berwenang di sekolah, seperti kepala sekolah atau dewan sekolah, tentang tindakan korupsi yang mereka saksikan. Mereka harus siap memberikan bukti yang mereka miliki.
- d. Gunakan Jalur Pelaporan Resmi
Di banyak negara, terdapat jalur pelaporan resmi untuk melaporkan tindakan korupsi di institusi pendidikan. Siswa dapat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh sekolah atau departemen pendidikan.

Bagaimana Pengelolaan Dana Sekolah Dapat Menjadi Area Rentan Terhadap Korupsi, dan Bagaimana Kita Bisa Mengatasi Masalah Ini?

- a. Transparansi dan Akuntabilitas
Buat sistem yang transparan dan akuntabel untuk mengelola dana sekolah. Pastikan semua transaksi keuangan dicatat dengan baik, dan lakukan audit secara teratur.
- b. Sistem Pengaduan
Buat sistem pengaduan yang aman dan rahasia untuk melaporkan tindakan korupsi. Pastikan bahwa pelapor tidak akan menghadapi tekanan atau represi.
- c. Hukuman yang Tegas
Pastikan bahwa ada konsekuensi hukum yang tegas untuk individu atau kelompok yang terlibat dalam tindakan korupsi. Ini dapat menciptakan deterrensi.
- d. Komitmen Kepemimpinan
Kepala sekolah dan komite sekolah harus memberikan contoh yang baik dalam hal etika dan integritas. Mereka harus memprioritaskan pengelolaan dana dengan transparansi dan kejujuran.

Apa saja Tindakan Konkret yang telah diambil oleh Sekolah dalam upaya mencegah korupsi?

- a. Pembentukan Kode Etik
Sekolah dapat mengembangkan dan mempromosikan kode etik yang jelas untuk guru, staf, siswa, dan orang tua. Kode etik ini dapat mencakup prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
- b. Penerapan Aturan dan Sanksi
Sekolah memiliki aturan yang jelas dan prosedur untuk mengatasi pelanggaran etika dan tindakan korupsi. Ini termasuk sanksi yang tegas dan dapat diterapkan

Apa Dampak Korupsi di Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan?

- a. Menurunkan Motivasi Belajar
Ketika siswa dan orang tua merasa bahwa sistem pendidikan dipenuhi oleh korupsi, ini dapat menurunkan motivasi belajar. Siswa mungkin merasa bahwa pencapaian mereka tidak dihargai, dan orang tua mungkin kehilangan kepercayaan pada sistem pendidikan.
- b. Merusak Moral dan Etika
Korupsi di sekolah juga dapat memberikan contoh buruk dan merusak moral dan etika siswa. Mereka dapat belajar bahwa tindakan curang dan korupsi adalah hal yang dapat diterima, yang pada gilirannya dapat merusak integritas mereka di masa depan.
- c. Merusak Reputasi Sekolah
Sekolah yang terlibat dalam korupsi dapat merusak reputasinya. Hal ini dapat mempengaruhi daya tarik sekolah untuk calon siswa dan guru yang berkualitas, dan juga bisa berdampak pada dukungan dari masyarakat dan pemerintah

Sekolah Sebagai Agen Pendidikan Anti korupsi

Dalam usaha menciptakan budaya anti korupsi di lingkungan sekolah, penting untuk mengembangkan perilaku anti korupsi dalam kegiatan peserta didik (Putri Sanyoto et al., 2019). Pendidikan Anti Korupsi dapat diintegrasikan dalam semua bentuk pendidikan, termasuk pendidikan formal, nonformal, dan informal. Meskipun demikian, pendidikan formal, khususnya di sekolah, dianggap sebagai jalur yang efektif untuk mempersiapkan generasi muda agar memiliki perilaku anti korupsi. Nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, kesederhanaan, keadilan, kedisiplinan, dan komitmen dapat ditanamkan dengan subur melalui budaya sekolah. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran strategis dalam mendidik dan mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda, dan

masyarakat masih mempercayakan kepada sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki fungsi strategis ini.

Membangun Nilai-nilai anti Korupsi di Kalangan Siswa SMA

Sekolah dipandang sebagai lembaga pendidikan yang sangat efektif, memiliki peran utama dalam membentuk karakter unggul, tangguh, dan bermoral pada individu (Arini Widyowati & M. Noor Rochman Hadjam, n.d.). Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK bersama guru-guru sekolah menengah telah merancang modul pendidikan Anti Korupsi khusus untuk siswa SMA. Modul ini bertujuan mengarahkan proses pembelajaran untuk mempersiapkan siswa agar mampu menginternalisasi nilai-nilai luhur dalam setiap aspek sikap dan perilakunya. Pendidikan Anti Korupsi dalam modul ini dirancang sebagai upaya konkret untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai bahaya korupsi serta pentingnya menegakkan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan siswa tidak hanya menjadi pribadi yang teredukasi secara akademis, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial di masyarakat.

PEMBAHASAN

Dampak Korupsi di Lingkungan Sekolah

Korupsi telah merusak sektor pendidikan dengan menyebabkan pengurangan anggaran pendidikan yang seharusnya mencukupi. Akibatnya, hak pendidikan warga negara terancam, dengan banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan, peningkatan jumlah anak yang putus sekolah, dan beban finansial yang semakin bertambah bagi orangtua murid. Dampak negatif dari korupsi ini mendorong guru sebagai tenaga pendidik untuk memberikan contoh sikap, perilaku, tindakan, dan perkataan yang positif kepada peserta didik, sehingga mereka dapat menjadi teladan yang baik. Selain itu, korupsi dalam sektor pendidikan juga merusak mentalitas pejabat yang semula melayani menjadi lebih cenderung untuk dilayani. Birokrasi pendidikan tidak lagi mengutamakan kepentingan pendidikan, melainkan lebih memprioritaskan kepentingan politik dan bisnis rekanan. Pejabat pendidikan sulit dihubungi ketika masyarakat menghadapi masalah pendidikan, sementara sebagian besar pendapatan pajak dari masyarakat digunakan untuk membayar gaji, tunjangan, dan honorarium mereka. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi pendidikan tidak hanya merugikan aspek finansial, tetapi juga merusak prinsip-prinsip pelayanan dan tanggung jawab dalam bidang pendidikan. (Pahlevi & Fahmi, 2022)

Faktor yang Mempengaruhi Korupsi di Lingkungan Sekolah

Tindakan korupsi seringkali mewarnai berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sektor ekonomi, hukum, sosial budaya, dan politik. Korupsi dalam sektor pendidikan juga tidak terkecuali, dengan kompleksitas sistem pendidikan dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan pendidikan menjadi faktor pendorong utama (Robby Kurniawan¹ et al., n.d.). Di lingkungan pendidikan menengah atas (SMA), korupsi dapat termanifestasi dalam penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh tenaga kependidikan. Tindakan ini dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi, melibatkan penyalahgunaan kewenangan, peluang, atau sarana yang dimiliki oleh para pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contoh lain terkait dengan kasus pemimpin perguruan tinggi yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mengakui bahwa sistem penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri kurang transparan. Dalam konteks ini, penyalahgunaan prinsip kerahasiaan dan pengambilan keputusan tanpa dokumentasi yang tepat dapat memfasilitasi terjadinya perilaku korupsi. Artinya, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan dapat membuka peluang bagi praktik korupsi, merugikan integritas sistem pendidikan secara keseluruhan (Debyra Restu Mauludi¹, n.d.).

Bagaimana Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan Sekolah

Korupsi dapat diartikan sebagai perilaku yang melanggar prinsip-prinsip etika, terutama dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi atau pendidikan. Tindakan ini bisa dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, termasuk melibatkan hubungan pribadi atau keluarga. Salah satu pendekatan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memasukkan konsep karakter antikorupsi ke dalam kurikulum atau program sekolah. Guru memegang peran kunci dalam upaya ini, dan kurikulum sekolah, termasuk silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP), menjadi alat penting untuk menyampaikan nilai-nilai karakter anti korupsi kepada para siswa. Melalui kurikulum, guru dapat menanamkan jiwa dan karakter anti korupsi sehingga para siswa dapat menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki sifat-sifat anti korupsi yang mendarah daging. Ini menggarisbawahi pentingnya peran pendidikan dalam membentuk karakter siswa agar memiliki sikap yang menentang korupsi, dan bagaimana kurikulum sekolah dapat menjadi sarana efektif untuk tujuan ini. (Kiromim Baroroh, n.d.)

Bentuk Korupsi yang Sering terjadi di Lingkungan Sekolah

- a. Orang tua memberikan suap kepada sekolah agar anaknya diterima, meskipun nilai seleksi masuk anak tersebut tidak mencukupi. Saya sering melihat situasi seperti ini terjadi, terutama di sekolah-sekolah swasta yang dianggap "favorit."
- b. Guru melakukan manipulasi nilai untuk menciptakan kesan bahwa murid-murid di sekolahnya berprestasi. Bahkan, pernah terdengar kabar bahwa beberapa guru sengaja memberikan jawaban Ujian Nasional kepada murid-murid agar mereka semua lulus UN dengan nilai yang memuaskan
- c. Sekolah meminta pembayaran iuran, meskipun siswa bersekolah di lembaga negeri yang seharusnya tidak memungut SPP, karena biaya pendidikan sudah ditanggung oleh pemerintah

Sanksi yang di Terima jika Terkibat Korupsi di Lingkungan Sekolah

- a. Menerapkan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, seperti pemberhentian, penurunan pangkat, atau mutasi pekerjaan sebagai respons terhadap pelanggaran.
- b. Mengimplementasikan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, di mana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terbukti disalahgunakan harus dikembalikan kepada satuan pendidikan atau kas daerah provinsi.
- c. Menjalankan proses hukum, mencakup tahap penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS.
- d. Melakukan pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun berikutnya bagi provinsi/kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran dengan sengaja dan terorganisir untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

Peran Tenaga Pendidik dalam Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi di Sekola

Upaya pemberantasan korupsi terdiri dari dua bagian besar, yaitu penindakan dan pencegahan. Keberhasilan dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi dipengaruhi oleh cara penyampaian dan pendekatan pembelajaran. Melibatkan peran serta masyarakat sangat penting, tidak hanya mengandalkan pemerintah, (Taja et al., n.d.) Untuk menjalankan pembelajaran nilai-nilai anti korupsi dengan lebih efektif dan efisien, guru perlu memilih dengan tepat model dan pendekatan pembelajaran. Ada empat model pembelajaran yang dapat digunakan oleh para tenaga pendidik dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi.

- a. Model kombinasi dengan kurikulum atau RPP
Penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi dapat dilakukan melalui pendekatan kombinasi mata pelajaran. Guru memiliki

kebebasan untuk memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi pelajaran yang relevan. Integrasi nilai-nilai anti korupsi dapat dilakukan melalui kegiatan "ice breaking" selama pembelajaran atau dalam beberapa topik yang berkaitan dengan nilai-nilai tersebut. Dengan model seperti ini, guru dapat menyampaikan pendidikan anti korupsi kepada semua peserta didik tanpa terkecuali. Kelebihan dari model ini adalah setiap guru ikut bertanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Pemahaman terhadap nilai-nilai hidup anti korupsi di dalam diri mahasiswa tidak hanya bersifat informatif-kognitif, tetapi juga bersifat terapan dalam setiap pembelajaran.

b. Melalui Ekstrakurikuler

Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat diintegrasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler di luar kegiatan pembelajaran formal. Pendekatan ini lebih menekankan pada pengolahan nilai dan penanaman melalui kegiatan konkret yang kemudian dibahas dan dieksplorasi. Keunggulan dari model ini adalah peserta didik dapat merasakan nilai-nilai tersebut melalui pengalaman langsung, sehingga mereka lebih terlibat dalam eksplorasi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Namun, kekurangan dari model ini adalah kurangnya struktur dalam pendidikan dan pengajaran di sekolah, waktu yang diperlukan cukup lama, dan kebutuhan akan pendamping yang dapat memberikan bimbingan dalam menanamkan nilai. Kegiatan semacam ini tidak dapat dilakukan secara sporadis, melainkan perlu diulang secara berkala..

c. Model pembiasaan

Penanaman nilai-nilai anti korupsi juga dapat terjadi melalui pembudayaan dalam semua kegiatan di lingkungan sekolah. Pembudayaan ini bertujuan menciptakan kebiasaan positif yang akan membentuk karakter individu. Strategi budaya dan kegiatan pembiasaan diperlukan untuk menciptakan budaya anti korupsi. Kebiasaan positif yang terbentuk akan menciptakan individu yang memiliki kepribadian positif. Dengan adanya pembiasaan ini, siswa dapat terbiasa untuk menghormati dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Pendidikan pembiasaan yang baik di sekolah dapat membawa dampak positif hingga ke kehidupan sehari-hari di rumah dan masa dewasa. Meskipun menanamkan kebiasaan baik membutuhkan waktu dan adaptasi, hal tersebut akan sulit untuk diubah kembali setelah menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, penanaman nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui kebiasaan dalam seluruh aktivitas di lingkungan sekolah.

d. Model gabungan

Pendekatan gabungan merupakan kombinasi antara model kombinasi dan model ekstrakurikuler secara bersamaan. Pendekatan ini memiliki keunggulan karena melibatkan semua guru dalam proses pembelajaran, bahkan mereka dapat mengambil pelajaran dari pihak luar untuk pengembangan peserta didik. Dalam pendekatan ini, peserta didik diperkenalkan pada nilai-nilai hidup yang membentuk kepribadian mereka melalui kombinasi pengetahuan informatif dan pengalaman melalui kegiatan-kegiatan yang terorganisir dengan baik.

Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran yang Berkarakter

Memperkaya diri dengan cara yang tidak benar adalah gambaran umum dari korupsi, sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh (Sutrisno, n.d.). Saat merinci pemahaman pendidikan antikorupsi, fokus pada sudut pandang pemahaman isu-isu moral yang lebih holistik dan berkarater, muncul pemahaman baru tentang pendidikan antikorupsi sebagai suatu bentuk pembelajaran yang khas. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran cocok untuk para siswa, namun tidak begitu relevan untuk kalangan guru, staf, karyawan, orang tua, dan pegawai yang usianya mungkin tidak lagi muda dan telah memiliki pengalaman cukup. Satuan pembelajaran pada masa lalu mungkin merujuk pada citra tertentu, kegiatan edukatif tertentu, atau fakta-fakta tentang pendidikan itu sendiri. Pendidikan ini umumnya terkait dengan pendidikan moral.

Pendidikan moral memiliki peran penting dalam membimbing individu memasuki tahap kehidupan dewasa. Meskipun usia dan pengalaman telah matang, namun pertumbuhan dan perkembangan moral seseorang tidak selalu berbanding lurus. Pendidikan moral diarahkan untuk memberikan bimbingan yang sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, sehingga kepribadian utama dapat terbentuk dengan baik. Fakta dalam masyarakat menunjukkan bahwa usia bukanlah jaminan bahwa seseorang memiliki kehidupan moral yang integral. Kejahatan, pelanggaran hak asasi manusia, dan perilaku koruptif adalah contoh nyata bahwa seseorang yang dianggap dewasa belum tentu memiliki kehidupan moral yang utuh. (Syauket et al., 2022). menegaskan bahwa pendidikan moral menjadi instrumen kunci untuk membentuk individu menjadi pribadi yang moral dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, pemahaman terhadap satuan pembelajaran yang berkarakter dapat diartikan sebagai suatu proses berkelanjutan bagi perkembangan individu dalam meningkatkan keberadaannya sebagai makhluk yang memiliki moralitas. Setiap kegiatan pendidikan yang memberikan manfaat bagi perkembangan kehidupan moral seseorang menjadi sangat relevan. Oleh karena itu, bahkan kaum dewasa tetap memerlukan satuan pembelajaran yang memiliki karakter khas. Penting

untuk diingat bahwa satuan pembelajaran berkarakter bukanlah suatu aset yang dapat dimiliki secara otomatis, melainkan merupakan peluang terbuka di mana setiap individu dapat merangkai, membangun, dan membentuk karakter individunya sesuai dengan peluang yang dinamis yang ada di depannya..

Satuan pembelajaran berkarakter merujuk pada pengetahuan yang terkait dengan pendidikan, teori, dan aplikasi. Dalam konteks ini, terdapat kesadaran dari peserta didik mengenai korupsi, yang diukur dengan parameter berupa aturan, baik berupa tata tertib tertulis maupun larangan yang disampaikan secara lisan (Putri Sanyoto et al., 2019). Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah "satuan pembelajaran berkarakter" mengacu pada berbagai proses pembelajaran di sekolah yang melibatkan interaksi, pendekatan humanis, dan saling ketergantungan antara guru dan murid.

Evaluasi Pendidikan Antikorupsi

Evaluasi pendidikan antikorupsi, seperti evaluasi objektif terhadap kehadiran siswa, tidak hanya digunakan untuk menilai dampak pendidikan antikorupsi pada setiap individu, tetapi juga dapat menjadi alat evaluasi untuk meningkatkan kualitas sekolah secara keseluruhan. Pada dasarnya, tindakan individu dapat memengaruhi kinerja komunitas. Transformasi sikap ini bukan hanya merupakan pencapaian bagi siswa sebagai individu, melainkan juga merupakan pencapaian bagi sekolah secara menyeluruh (Rizki et al., n.d.). Kompetensi guru juga merupakan kemampuan yang penting untuk mencapai hasil kerja yang baik dan efektif. Prinsip dasar dari pendidikan antikorupsi di sekolah adalah bahwa tindakan individu memiliki makna dan dampak signifikan pada perkembangan sekolah.

Evaluasi pendidikan antikorupsi di atas sebenarnya masih mengadopsi sudut pandang yang bersifat kuratif-negatif. Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi dinilai berdasarkan penilaian atas berkurangnya perilaku negatif di lingkungan sekolah, seperti ketidakdisiplinan, bolos, terlibat tindak kejahatan, penggunaan narkoba, tidak lulus/tidak naik kelas, terlibat tawuran pelajar, mencontek, dan keterlambatan dalam menyerahkan tugas. Seluruh kriteria tersebut dirumuskan dengan menggunakan kata kunci "tidak"..(Raras Ramadhani, n.d.)

Evaluasi seperti ini sebenarnya hanya merupakan langkah awal, karena penghayatan nilai tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga mampu meningkatkan kreativitas siswa secara keseluruhan. Jika di sekolah tidak lagi terjadi bolos, tawuran pelajar, keterlambatan menyerahkan tugas, ketidaknaikan kelas, atau tindakan menyontek, kriteria apa yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pendidikan antikorupsi? Kriteria tersebut adalah kreativitas, yaitu inisiatif yang mencerminkan keseluruhan kinerja sekolah, yang dikenal sebagai prestasi. Sekolah yang berprestasi mampu mengatasi masalah perilaku tidak disiplin dan tidak jujur

siswa, mengarahkan mereka ke arah positif, dan menyempurnakan kinerja pendidikan secara keseluruhan.,

KESIMPULAN

Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh tenaga kependidikan di lingkungan sekolah merupakan permasalahan serius yang perlu ditangani dengan serius pula, mengingat dampak jangka panjangnya dapat merusak mutu pendidikan di Indonesia. Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana BOS di lingkungan sekolah mencakup kurangnya pengawasan oleh instansi-instansi yang seharusnya bertanggung jawab, seperti Inspektorat Provinsi dan Dinas Pendidikan Provinsi. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana BOS juga dapat menjadi peluang besar bagi tenaga kependidikan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Penjatuhan hukuman yang ringan oleh Hakim juga menjadi faktor lain yang memungkinkan terjadinya kejahatan korupsi di lingkungan sekolah. Selain itu, kurangnya kesadaran dan ketidakpedulian masyarakat terhadap tindak pidana korupsi dana BOS menjadi faktor pendorong bagi tenaga kependidikan untuk melibatkan diri dalam praktik korupsi.

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi pendidikan anti-korupsi di sekolah dan dampaknya terhadap pemahaman siswa mengenai korupsi serta sikap mereka terhadap tindakan korupsi. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pihak sekolah dan pemerintah dalam meningkatkan program pendidikan anti-korupsi di lingkungan sekolah.

SARAN

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pendidikan anti-korupsi di lingkungan sekolah dan dampaknya terhadap pemahaman siswa tentang korupsi serta sikap mereka terhadap tindakan korupsi. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pihak sekolah dan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas program pendidikan anti-korupsi di sekolah. Dengan demikian, diharapkan adanya perbaikan dan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap bahaya korupsi serta mendorong terbentuknya sikap yang menolak korupsi di kalangan generasi muda..

DAFTAR PUSTAKA

Adelia Ravita Sekar Sari. (2021). Manajemen Pendidikan Antikorupsi di SMA Kesatrian 2 Semarang. In Seminar Nasional Ke-Indonesiaan.

- Anita, Widijaya, Jesslyn, Mavrict Josephino, Salinda, Sellya Chandra, Stella Novianti, & Winny. (n.d.). Perancangan Dan Pelaksanaan Proyek Integritas Dan Gerakan Anti Korupsi Di Sekolah Menengah Atas Swasta Maha Bodhi Karimun. <http://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro>
- Arini Widyowati, & M.Noor Rochman Hadjam. (n.d.). PENDIDIKAN KARAKTER MASALAH HAMBATAN KOMPETENSI GURU DAN PENGEMBANGANNYA DI LINGKUNGAN SEKOLAH.
- Aris Munandar, & Oki Dermawan. (2021). Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Menengah Atas. ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan, 12(1), 1–20. <https://doi.org/10.47766/itqan.v12i1.181>
- Debyra Restu Mauludi1. (n.d.). Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana BOS Oleh Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Perspektif Kriminologi.
- Kiromim Baroroh. (n.d.). Integrasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Ekonomi di sekolah menengah atas.
- Pahlevi, P., & Fahmi, I. (2022). Peran Tenaga Pendidik Dalam Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi di Sekolah Menengah Atas. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(16), 444–454. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7067974>
- Putri Sanyoto, A., Rejekiningsih, T., Hendri Nuryadi, M., & Sebelas Maret Surakarta, U. (2019). PENANAMAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI MELALUI KEGIATAN PEMBELAJARAN OUTING CLASS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (STUDI PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR) (Vol. 7, Issue 2).
- Raras Ramadhani. (n.d.). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter Di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tambun Selatan.
- Rilo Pambudi, S, Rehendra Sucipta, P., & Syahputra, I. (2021). Integrasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kegiatan Osis Di SMS Negeri 2 Kota Tanjungpinang. Jurnal Karya Abdi, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.32520/karyaabdi.v2i1.1260>
- Rizki, W. P., Sumardjoko, B., & Artikel, S. (n.d.). PERAN GURU PPKn DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI PADA PESERTA DIDIK.
- Robby Kurniawan1, Alden Nelson, Frendy, Nurul Jofia, Shirlyn, Velly Fitri, Utami, Vallencia, & Tio Sania. (n.d.). Membangun Dan Mendidik Generasi Anti Korupsi Bersama SMP Yos Sudarso. <http://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro>
- Sutrisno, M. M. (n.d.). Pengembangan modul pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas x sekolah menengah atas.

- Syauket, A., Karsono, B., & Ario Bangun, M. F. (2022). PENYULUHAN: UPAYA PENGUATAN PERILAKU ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN SMA BEKASI DI MASA PANDEMI COVID-19. *Abdi Bhara*, 1(2), 101–109. <https://doi.org/10.31599/abhara.v1i2.1608>
- Taja, N., Tarbiyah, F., Keguruanuniversitas, D., Bandung, I., & Aziz, H. (n.d.). MENGINTEGRASIKAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH ATAS.